

# KONSTRUKSI REALITAS POLITIK PEMBERITAAN KASUS RATU ATUT CHOSIYAH MENURUT METROTVNEWS.COM

**Muhammad Asnan, S.Sos., M.I.Kom.**

Fakultas Ilmu Sosial Dan Budaya, Universitas Gajayana Malang

Jl. Mertojoyo Blok L Merjosari Malang, Telp. (0341) 562411

Email : [asnanm57@yahoo.co.id](mailto:asnanm57@yahoo.co.id)

## **ABSTRACT**

*Using a descriptive qualitative approach, this study aims to determine how the two online media, news framing Metrotvnews.com and RatuAtutChosiyah case. Selection of media based on the intensity of the two media in question are quite high in reporting political events and laws, including cases that ensnared RatuAtutChosiyah. For purposes of analysis used framing analysis model of Pan and Kosicki which includes syntactic structure, script, thematic and rhetorical analysis unit in the form of text news. The result can be inferred, in framing news Metrotvnews.com RatuAtutChosiyah cases tend to be negative. This trend can be seen from the syntactic structure, script, thematic and rhetorical presented. Among the selection of the title and source citations. From the title and the chosen quotation sources most of them tend to give disadvantages eventhough, they seem neutral, they still do not give benefits to Atut. Election-related citations referenced sources; the media mostly just use one source of referrals, so that the principle of the balance is not met.*

**Keywords:** *framing, political event, atut cases, online media*

## **1. PENDAHULUAN**

Menjelang berakhirnya tahun 2013 secara tiba-tiba publik dihebohkan oleh pemberitaan media yang melibatkan Ratu Atut Chosiyah selaku Gubernur Banten. Gubernur perempuan pertama di Indonesia yang memimpin provinsi paling barat Pulau Jawa ini menurut Ketua KPK Abraham Samad diindikasikan terlibat dalam kasus dugaan suap terkait penanganan sengketa Pilkada Lebak dan korupsi pengadaan alat kesehatan Provinsi Banten. Atut dijerat dengan pasal 6 ayat 1 Huruf a UU No. 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 nomor 1 KUHP. Ratu Atut dinyatakan secara bersama-sama atau turut serta dengan tersangka Tubagus Chaeri Wardana dalam kasus penyuaian Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar (tvonenews.tv diakses 4 Januari 2014)

Secara prinsip, kasus yang proses hukumnya masih berlangsung sampai saat ini merupakan murni pelanggaran hukum. Namun, persoalannya menjadi berbeda terkait dengan posisi Atut yang juga sebagai kader Partai Golkar. Adalah fakta yang tidak bisa dinafikan bahwa partai berlambang pohon beringin tersebut bersama-sama PDIP

merupakan partai pendukung dan pengusung yang mengantarkan Atut menjadi pemenang pada Pilkada Banten periode 2012-2017. Imbasnya, ruang perdebatan yang semula hanya berada di ranah hukum, mau tidak mau harus merambah ke wilayah politik. Hal inilah yang menjadikan kasus Atut sebagai bahan liputan yang menarik bagi media massa. Salah satu penyebabnya, karena peristiwa politik yang melibatkan tingkah laku dan pernyataan para aktornya senantiasa bernilai berita, dan liputan yang layak diberitakan adalah peristiwa yang memiliki nilai berita (Mc Nair dalam Hamad, 2004:1).

Liputan politik yang merupakan liputan setiap peristiwa, secara tertulis ataupun rekaman adalah konstruksi realitas, yaitu suatu upaya menyusun realitas dari satu atau sejumlah peristiwa yang semula terpenggal-penggal (acak) menjadi tersistematis hingga membentuk wacana atau cerita yang bermakna (Nimmo dalam Hamad, 2004:10). Sedangkan, bahasa adalah elemen utama dalam memberikan gambaran (makna citra) mengenai suatu realitas yang akan muncul di benak khalayak (DeFleur, Melvin and Sandra Ball-Rocheach, 1989:265-269),

Penting untuk dipahami bahwa dalam setiap konstruksi realitas, masing-masing media memiliki pertimbangan dan makna yang disesuaikan dengan kebijakan redaksi media bersangkutan (*redactional concept*) (Hamad, 2004:26). Pertimbangannya dapat didasarkan atas kepentingan internal maupun eksternal media, baik bersifat idealis, ideologi, ekonomi, maupun politik. Sebuah realitas bisa saja dibesar-besarkan, disamarkan atau bahkan tidak diangkat sama sekali. Perbedaan pertimbangan tersebut yang menyebabkan satu peristiwa yang sama dimaknai secara berbeda-beda oleh media massa dan pada titik tertentu seringkali obyektivitas berita yang dimuat di media massa tersebut tidak sesuai dengan yang dibayangkan pembaca. Dengan kata lain, obyektivitas berita menjadikan fakta sebuah berita berujung persoalan. Hal ini terjadi karena realitas ternyata tidak bisa dipindah begitu saja ke dalam media. Realitas media hadir sebagai produk interaksi antara wartawan dan fakta (Eriyanto, 2002:16).

Hadirnya kasus Atut sebagai realitas politik di tengah publik membawa konsekuensi pengkonstruksian yang bias jadi memunculkan perbedaan antara satu media dengan media lainnya. Salah satu cara yang dipakai untuk menangkap masing-masing media dalam mengkonstruksi suatu realitas adalah *framing* (Eriyanto, 2002:7). Secara sederhana, sasaran analisis *framing* adalah untuk mengetahui bagaimana realitas dibingkai oleh media melalui proses konstruksi.

Keniscayaan melakukan pembingkai berita juga berlaku pada media *online*. Dengan karakteristik yang berbeda dengan media konvensional, media *online* adalah entitas yang mampu dengan cepat melakukan siaran audio visual melalui *web*, bahkan bisa berbentuk *special report*, dilengkapi dengan transkrip untuk konsumsi audiens. Interaktifitas tinggi media *online* dalam melayani khalayak (Santana, 2005:137) inilah yang menjadi daya tarik pengguna (*user*), termasuk kebutuhan mereka terhadap berita-berita hukum dan politik.

Salah satu media *online* yang turut aktif memberitakan kasus Ratu Atut Chosiyah adalah Metrotvnews.com. Dalam rentang 1 (satu) hari saja, yakni tanggal 20 Desember 2013, frekuensi pemberitaan kasus Atut di

Metrotvnews.com mencapai 59 kali. Keaktifan portal berita ini dalam melakukan pemberitaan terhadap isu-isu politik dan hukum yang tengah menjadi sorotan publik menjadi dasar pertimbangan penulis untuk menggunakan media tersebut sebagai obyek penelitian.

Berangkat dari adanya pertanyaan mendasar seputar terjadinya kasus Ratu Atut Chosiyah, penelitian ini mencoba melihat bagaimana Metrotvnews.com yang berada dalam naungan Media Grup milik Surya Paloh mengkonstruksikan kasus Ratu Atut Chosiyah dalam bingkai beritanya sebagai suatu *symbolic reality* dalam pemberitaan mereka. Menggunakan model analisis framing yang bersumber dari Pan dan Kosicki, kajian ini menjadi penting bila dikaitkan dengan dilangsungkannya Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden secara langsung pada tahun 2014. Dalam pandangan Pan dan Kosicki framing adalah strategi konstruksi dan memproses berita. Perangkat kognisi yang digunakan dalam mengkode informasi, menafsirkan peristiwa dan dihubungkan dengan rutinitas dan konversi pembentukan berita (Eriyanto, 2002:68).

## 2. KAJIAN LITERATUR

### Berita, Nilai Berita, dan Proses Produksi Berita

Berita pada dasarnya adalah rekonstruksi tertulis atas sebuah fakta. Wartawan melaporkan kembali apa yang dilihat, dirasakan, dan diamati kepada pembaca. Untuk melakukan hal tersebut, peran bahasa sangat penting, mengingat dengan penggunaan bahasa yang baik, fakta yang ditulis akan dapat ditangkap oleh pembaca sebagaimana fakta yang sesungguhnya. Hanya lewat bahasa yang cermatlah rekonstruksi tertulis itu dapat mengantarkan pembaca untuk membayangkan apa yang sesungguhnya yang terjadi (Siregar, 1998:90).

Ideologi profesional wartawan yang paling jelas tentu saja terkait dengan apa itu berita dan berita apa yang baik. Semua itu mempunyai ukuran dan kriteria yang disebut nilai berita. Eriyanto (2009:104) menjelaskan nilai-nilai berita itu menentukan bukan hanya peristiwa apa saja yang akan diberitakan,

melainkan juga bagaimana peristiwa tersebut dikemas. Ini merupakan prosedur awal dari bagaimana peristiwa dikonstruksi.

Proses produksi berita bukan hanya berkaitan dengan wartawan, melainkan juga berhubungan dengan kerangka kerja atau sistem kerja organisasi media tempat wartawan tersebut bernaung. Fishman dalam Aurora (2006:49) menyatakan bahwa ada 2 (dua) kecenderungan studi tentang bagaimana proses produksi dilihat. Pandangan pertama memfokuskan pada seleksi berita (*selectivity of news*), yang melihat proses produksi berita hanya sebatas proses seleksi saja dengan wartawan sebagai "penjaga gawang" (*gatekeeper*). Pendekatan yang kedua adalah pendekatan pembentukan berita (*creation of news*). Peristiwa bukan diseleksi, melainkan dibentuk. Wartawan membentuk peristiwa mana yang disebut berita dan mana yang tidak.

Tahap awal dari proses produksi berita adalah bagaimana wartawan mempersepsi peristiwa yang akan diliputnya. Konsepsi wartawan yang menentukan batasan-batasan mana yang dianggap berita dan mana yang tidak. Ada banyak faktor yang menentukan suatu peristiwa dikatakan sebagai berita. Aspek tertentu dari peristiwa dikedepankan sementara aspek lain tidak ditonjolkan. Proses seleksi dan sortir ini terjadi dalam suatu rutinitas kerja keredaksionalan. Institusi media secara teratur memproduksi berita, dan proses seleksi itu adalah bagian dari ritme dan keteraturan kerja yang dijalankan setiap harinya.

### **Berita dan Wartawan dalam Pandangan Paradigma Konstruksionis**

Eriyanto (2009:26-27) menyatakan bahwa bagaimana realitas itu dijadikan berita sangat tergantung pada bagaimana fakta dipahami dan dimaknai oleh media atau wartawan. Dalam pembentukan dan penulisan berita, secara sadar atau tidak sadar akan melibatkan nilai-nilai tertentu yang dimiliki wartawan atau media, sehingga mustahil berita merupakan pencerminan realitas. Realitas yang sama bisa jadi menghasilkan berita yang berbeda, karena adanya cara pandang yang berbeda. Oleh karena itu, berita bersifat subjektif karena saat melihat realitas wartawan atau media melihat dengan perseptif dan

pertimbangan subjektif. Perbedaan antara realitas yang sesungguhnya dengan berita tidak dianggap kesalahan, tetapi suatu kewajaran karena berita adalah produk jurnalistik bukan representasi dari realitas.

Paradigma konstruksionis memandang wartawan sebagai agen/ aktor konstruksi. Wartawan bukan hanya melaporkan fakta, memberitakan atau mentransfer apa yang dilihatnya dilapangan, melainkan wartawan juga mendefinisikan peristiwa dan secara aktif membentuknya. Wartawan menguraikan, mengurutkan, mengonstruksi peristiwa demi peristiwa, sumber demi sumber, serta membentuk citra dan berita tertentu. Saat meliput satu peristiwa dan menuliskannya, ia secara sengaja atau tidak menggunakan dimensi perseptualnya. Realitas mau tidak mau sulit dilepaskan dari unsur subjektivitas. Berita pada dasarnya adalah hasil olahan dan konstruksi wartawan. Sebagai konsekuensinya, realitas yang dihasilkan bersifat subjektif (Eriyanto, 2009:29). Dalam proses kerjanya wartawan sering kali menyimpulkan terlebih dahulu kemudian melihat fakta yang ingin dikumpulkan. Wartawan tidak bisa menyembunyikan pilihan moral dan keberpihakannya karena ia merupakan bagian yang intrinsik dalam pembentukan berita. Lagi pula berita yang disajikan bukan merupakan produk individual wartawan, melainkan juga merupakan bagian dari proses organisasi dan interaksi antara wartawannya. (Eriyanto, 2002:28)

### **Media Massa dan Konstruksi Realitas Politik**

Kesibukan utama media massa adalah mengkonstruksikan berbagai realita yang akan disiarkan. Media menyusun realitas dari berbagai peristiwa yang terjadi hingga menjadi cerita atau wacana yang bermakna. Pembuatan berita pada dasarnya adalah penyusunan realitas-realitas hingga membentuk sebuah cerita atau wacana yang bermakna (Hamad, 2004:11).

Dalam proses konstruksi realitas, bahasa adalah unsur utama. Ia merupakan instrumen pokok untuk menceritakan realitas. Bahasa adalah alat konseptualisasi dan alat narasi. Tidak ada berita, cerita ataupun ilmu pengetahuan tanpa bahasa. Penggunaan bahasa (simbol) tertentu menentukan format narasi

(dan makna ) tertentu. Sedangkan jika dicermati seluruh isi media baik cetak ataupun elektronik menggunakan bahasa baik verbal (kata-kata tertulis atau lisan) maupun bahasa non verbal (gambar, foto, gerak-gerik, grafil dan tabel) (Tuchman, 1980: 104-130).

Penggunaan bahasa tertentu berimplikasi pada bentuk konstruksi realitas dan makna yang dikandungnya. Pilihan kata dan cara penyajian suatu realitas ikut menentukan struktur konstruksi realitas dan makna yang muncul darinya. Dari perspektif ini, bahkan bahasa bukan hanya mampu mencerminkan realitas, tetapi sekaligus dapat menciptakan realitas (Hamad, 2004:13).

Bahasa (teks) mampu menentukan konteks. Bukan sebaliknya teks menyesuaikan diri dengan konteks. Dengan begitu, lewat bahasa yang dipakainya (melalui pilihan kata dan cara penyajian) seseorang bisa mempengaruhi orang lain. Melalui teks yang dibuatnya, seseorang dapat memanipulasi konteks (Giles dan Wiemann dalam Hamad, 2004:14). Bahkan dalam bahasa, kekuatan kata-kata dan struktur bahasa dapat menentukan makna (gambaran) suatu realitas. Sehingga bahasa (baca: pembicaraan politik) bisa didayagunakan untuk kepentingan politik (Bennet dalam Hamad, 2004:15).

Peristiwa politik selalu menarik perhatian media massa sebagai bahan liputan. Hal ini terjadi karena 2 faktor. Pertama, dewasa ini politik berada di era mediasi (*politics in the age of mediation*), kedua, peristiwa politik dalam bentuk tingkah laku dan pernyataan para aktor politik lazimnya selalu mempunyai nilai berita sekalipun peristiwa politik itu bersifat rutin belaka. (Mc Nair dalam Hamad, 2004:1).

Liputan politik cenderung lebih rumit ketimbang reportase bidang kehidupan lainnya. Liputan politik memiliki dimensi pembentukan opini publik (*public opinion*), baik yang diharapkan oleh para politisi maupun oleh wartawan. Dalam komunikasi politik, aspek pembentukan opini ini memang menjadi tujuan utama, karena hal ini akan mempengaruhi pencapaian-pencapaian politik para aktor politik (Nimmo dalam Hamad, 2004:2). Dalam kerangka pembentukan opini publik ini, Hamad (2004:2-3) menyatakan bahwa media massa umumnya melakukan 3 kegiatan sekaligus, yaitu: 1) Menggunakan

simbol-simbol politik (*language of politic*), 2) Melaksanakan strategi pengemasan pesan (*framing strategic*), dan 3) Melakukan fungsi agenda setting media (*agenda setting function*). Sebuah media bisadipengaruhi oleh berbagai faktor internal berupa kebijakan redaksional tertentu mengenai suatu kekuatan politik, kepentingan politik para pengelola media, relasi media dengan sebuah kekuatan politik tertentu, dan faktor eksternal seperti tekanan pasar pembaca atau pemirsa, sistem politik yang berlaku, dan kekuatan-kekuatan luar lainnya. Dengan demikian, satu peristiwa politik bisa menimbulkan opini publik yang berbeda-beda tergantung dari cara masing-masing media melaksanakan 3 (tiga) tindakan tersebut.

Salah satu faktor yang memberi pengaruh signifikan terhadap proses pembuatan atau pengonstruksian realitas politik hingga jenis opini yang terbentuk adalah sistem media massa dimana sebuah media menjalankan operasi jurnalistiknya. Media massa memiliki kekuatan tersendiri dalam mempengaruhi sistem politik sehingga hubungan antar keduanya biasanya ditandai oleh 2 hal, pertama, bentuk dan kebijakan politik sebuah negara menentukan pola operasi media massa di negara itu, mulai dari kepemilikan, tampilan isi, hingga pengawasannya. Sistem media massa yang berlaku di sebuah negara menjadi cerminan sistem politik (rezim) negara itu (Siebert, 1986). Kedua, media massa sering menjadi media komunikasi politik terutama oleh para penguasa. Setiap kekuatan politik sedapat mungkin memakai media massa untuk melancarkan hajat politiknya (McNair dalam Hamad, 2004:8). Tidak selamanya media massa ditentukan oleh sistem politik melainkan tergantung pada persebaran kekuasaan (*power sharing*) yang terjadi di negara itu.

Penguasa dan aktor-aktor politik merupakan sumber berita bagi media massa. Hal inidikarenakan peristiwa politik dan tingkah laku (pernyataan) para aktor politik umumnya mempunyai nilai berita sekalipun peristiwanya bersifat rutin belaka (Nimmo dalam Hamad, 2004:8). Sesuai asas pemberitaan sebuah liputan yang laik berita adalah peristiwa yang memiliki nilai berita.

Ada 2 (dua) penyebab bahwa komunikasi politik yang melibatkan media

massa memiliki ciri khas membentuk opini publik. Pertama, dari luas jangkauan media dalam menyebarkan berbagai pesan dan pembicaraan politik beserta fungsinya masing-masing. Kedua, dari aspek campur tangan media dalam menyajikan realitas politik melalui suatu proses yang disebut konstruksi realitas (*construction of reality*). Para aktor berharap bahwa menggunakan simbol-simbol politik dalam pembicaraan-pembicaraan politik bisa mendatangkan berbagai keuntungan politik, mulai dari; 1) keuntungan material, 2) peningkatan status, 3) pemberian identitas, serta 4) penyebaran informasi dan media massa merupakan alat bantu yang ampuh untuk mencapai tujuan politik ke-2, 3, dan 4 (Nimmo dalam Hamad, 2004:10).

Hamad (2004:16) mengungkapkan beberapa tindakan yang dilakukan pekerja media, khususnya oleh para komunikator massa tatkala melakukan konstruksi realitas adalah melalui pemilihan simbol (fungsi bahasa) dan pemilihan fakta yang disajikan (strategi *framing*). Pemilihan kata (simbol politik), sekalipun media massa hanya bersifat melaporkan, tapi telah menjadi sifat dari pembicaraan politik untuk selalu memperhitungkan simbol politik.

Dalam komunikasi politik, para komunikator bertukar citra-citra atau makna-makna melalui lambang politik. Mereka saling menginterpretasikan pesan-pesan (simbol-simbol) politik yang diterimanya. Ketika melakukan pengutipan langsung (*direct quotation*) atau menjadikan seorang komunikator politik sebagai sumber berita, media massa tetap terlibat (langsung atau tidak langsung) dengan pilihan simbol yang digunakan sumber tersebut. Pengambilan satu nara sumber tentu didasarkan atas pertimbangan tertentu. Pada saat media massa membuat ulasan, pilihan kata (simbol) itu ditentukan oleh sang komunikator massa. Apapun simbol yang dipilih akan mempengaruhi makna yang muncul. Hal ini bisa dijelaskan melalui teori semiotika atau ilmu tentang tanda dimana simbol merupakan satu dari 3 tanda (Zhoest, 1993:1).

Dalam melakukan pembingkai (*framing*) peristiwa politik, jarang ada media yang membuat berita sebuah peristiwa secara utuh mulai menit pertama hingga menit terakhir. Atas nama kaidah jurnalistik,

peristiwa yang panjang, lebar, dan rumit, dicoba disederhanakan melalui mekanisme pembingkai (*framing*) fakta-fakta dalam bentuk berita sehingga layak terbit atau layak tayang. Untuk kepentingan pemberitaan tersebut, komunikator massa seringkali hanya menyoroti hal-hal penting (mempunyai nilai berita) dari sebuah peristiwa politik, sehingga mulai dapat ditebak ke arah mana pembentukan (formasi) sebuah berita. Konstruksi realitas politik sangat ditentukan oleh siapa yang memiliki kepentingan (menarik keuntungan atau pihak mana yang akan diuntungkan) dengan suatu berita, dimana kepentingan itu bisa dimiliki oleh media atau pihak yang memiliki relasi khusus dengan media tersebut (Gandy dalam Hamad, 2004:21).

Secara eksternal, media massa yang tidak hidup dalam situasi vakum pada struktur dan penampilannya dipengaruhi oleh sistem politik sebuah negara. Jika mengacu pada 4 (empat) Teori Pers Negara, dalam sistem otoritarian penguasa (negara) menjadi acuan mengkonstruksikan realitas, sebaliknya dalam iklim politik liberal seperti berlaku saat pemilu 1999, media massa mempunyai kebebasan sangat luas dalam mengkonstruksikan realitas. Patokannya adalah kebijaksanaan redaksi (*redactional concept*) yang boleh jadi dipengaruhi oleh kepentingan idealis, ideologis, politik dan ekonomi. Namun apapun pertimbangannya, yang pasti selalu ada yang ditonjolkan, disamarkan, atau tidak diangkat sama sekali dalam setiap pengkonstruksian realitas (Hamad, 2004:26)

Pelaporan sebuah peristiwa tak terkecuali politik, jelas harus memperhitungkan pasar. Kepuasan khalayak atas hasil reportase dalam ranah politik banyak tergantung pada lambang-lambang politik baik berupa tokoh politik, gambar partai, cara melaporkan sebuah peristiwa politik dan sebagainya. Media massa yang piawai memainkan lambang-lambang ini, niscaya akan memperoleh perhatian dari segmen khalayak dengan idiologi politik mereka masing-masing. Dalam membidik pasar pun demikian, konstruksi realitas politik sangat dipengaruhi faktor idiologi yang dimiliki media dan yang dianut khalayak. Kongsi antara negara dan pengusaha merupakan faktor eksternal yang juga mempengaruhi pengkonstruksian realitas media. Ini biasanya

terjadi pada negara-negara demokrasi kerkategori gurem. Sedangkan faktor internal yang berpengaruh dalam pengkonstruksian realitas media adalah jurnalis itu sendiri sebagai makhluk sosial (Hamad, 2004:27).

Dalam proses pengkonstruksian realitas politik, media massa memiliki dua kemungkinan, yaitu menjadi saluran komunikasi politik yang merefleksikan peristiwa-peristiwa politik yang terjadi atau menjadi agen politik dimana terutama para jurnalisnya bertindak selaku komunikator politik dalam kategori profesional (Nimmo dalam Hamad, 2004:28). Untuk kepentingan pencitraan, media massa sering terlibat dengan pemberian julukan (*label*) kepada aktor dan atau kekuatan politik. Dalam konteks ini, para komunikator massa dalam rutinitasnya serupa dengan lembaga stempel yang memberi persetujuan (pembenaran) dan ketidaksetujuan (penyangkalan) terhadap tindakan-tindakan politik (Herman dan Chomsky dalam Hamad, 2004:30). Bagi suatu kekuatan politik, sikap sebuah media, entah netral atau partisan adalah menentukan, terutama untuk tujuan-tujuan pencitraan dan opini publik. Selain itu, suatu media adalah pelita ganda pesan (*multiplier of message*) yang berkaitan dengan saluran lainnya (*media aslinks in other chains*) (Fagen dalam Hamad, 2004:30).

### **Analisis Framing Pan dan Kosicki**

Framing adalah sebuah cara bagaimana peristiwa disajikan oleh media. Penyajian tersebut dilakukan dengan menekankan bagian tertentu, menonjolkan aspek tertentu, dan membesarkan cara bercerita tertentu dari suatu realitas/peristiwa. Media menseleksi, menghubungkan, dan menonjolkan peristiwa sehingga makna dari peristiwa lebih mudah menyentuh dan diingat oleh khalayak (Soesilo dan Waburn dalam Eriyanto, 2002:67). Realitas yang kompleks dipahami dan disederhanakan dalam kategori tertentu. Bagi khalayak, penyajian realitas yang demikian membuat realitas lebih bermakna dan dimengerti (Durham dalam Eriyanto, 2002:67).

Dalam bahasa yang lebih sederhana analisis framing merupakan sebuah analisis untuk mengetahui bagaimana realitas (peristiwa, aktor, kelompok, atau apa saja)

dibingkai oleh media. Pembingkaiannya tentu saja melalui proses konstruksi. Disini realitas sosial dimaknai dan dikonstruksi dengan makna tertentu. Konsekuensinya, bingkai berita kasus antar media massa pun juga menjadi berbeda. (Eriyanto, 2009:3)

Framing mempunyai 2 aspek, pertama memilih fakta atau realitas. Dalam memilih fakta, selalu terkandung 2 (dua) kemungkinan: apa yang dipilih (*included*) dan apa yang dibuang (*excluded*). Kedua, menuliskan fakta. Proses ini berhubungan dengan bagaimana fakta yang dipilih itu disajikan kepada khalayak. Realitas yang disajikan secara menonjol atau mencolok, mempunyai kemungkinan lebih besar untuk diperhatikan dan mempengaruhi khalayak dalam memahami suatu realitas (Eriyanto, 2002:69).

Pan dan Kosicki mendefinisikan framing sebagai strategi konstruksi dan memproses berita. Perangkat kognisi yang digunakan dalam mengkode informasi, menafsirkan peristiwa dan dihubungkan dengan rutinitas dan konversi pembentukan berita (Eriyanto, 2002:68). Pan dan Kosicki menyatakan bahwa terdapat 2 (dua) konsepsi dari framing yang saling berkaitan (Eriyanto, 2002:252). Pertama, pada konsepsi psikologi yaitu bagaimana seseorang memproses informasi dalam dirinya serta bagaimana seseorang mengolah sejumlah informasi dan ditunjukkan dalam skema tertentu. Kedua, konsepsi sosiologis yaitu bagaimana individu menafsirkan suatu peristiwa melalui cara pandang tertentu. Bagaimana seseorang mengklasifikasikan, mengorganisasikan, dan menafsirkan pengalaman, untuk mengerti dirinya dan realitas di luar dirinya (Eriyanto, 2002:253).

Dalam pendekatan ini, perangkat framing dapat dibagi dalam 4 (empat) struktur besar yaitu: struktur sintaksis, struktur skrip, struktur tematik, struktur retorik (Eriyanto, 2002:257-266). Struktur sintaksis berhubungan dengan bagaimana wartawan menyusun peristiwa-pertanyaan, opini, kutipan, pengamatan atas peristiwa-kedalam bentuk susunan kisah berita. Dengan demikian, struktur sintaksis ini bisa diamati dari bagan berita (headline yang dipilih, lead yang dipakai, latar informasi yang dijadikan sandaran, sumber yang dikutip, dan sebagainya). Bentuk sintaksis yang paling

populer adalah Piramida Terbalik, dimana bagian yang di atas lebih penting dibandingkan bagian yang dibawahnya. Unit yang diamati dalam struktur sintaksis, antara lain: a) *Headline*/Judul berita, b) *Lead*/Teras berita, c) Latar Informasi, d) Kutipan Sumber.

Struktur skrip berhubungan dengan laporan berita sering disusun sebagai suatu cerita. Hal ini dikarenakan dua hal, pertama banyak laporan berita yang berusaha menunjukkan hubungan, peristiwa yang ditulis merupakan kelanjutan dari peristiwa sebelumnya. Kedua, berita umumnya mempunyai otoritas menghubungkan teks yang ditulis dengan lingkungan komnal pembaca (Eriyanto, 2002:260). Bentuk umum dari struktur skrip adalah 5 W + 1 H (*who, what, when, where, why dan how*). Meskipun pola ini tidak selalu dapat dijumpai dalam setiap berita yang ditampilkan, kategori informasi ini yang diharapkan diambil oleh wartawan untuk dilaporkan. Unsur kelengkapan berita ini dapat menjadi penanda framing yang penting (Eriyanto, 2002:260-261).

Struktur tematik berhubungan dengan fakta itu ditulis, bagaimana kalimat yang dipakai, bagaimana menempatkan dan menulis sumber ke dalam teks berita secara keseluruhan. Struktur tematik dapat diamati dari berbagai bagaimana peristiwa diungkap atau dibuat wartawan. Bagi Pan dan Kosicki, berita mirip sebuah pengujian hipotesis. Peristiwa yang diliput, sumber yang dikutip, dan pernyataan yang diungkapkan, semua perangkat itu digunakan untuk membuat dukungan yang logis bagi hipotesis yang dibuat. Tema yang dihadirkan atau dinyatakan secara tidak langsung atau kutipan sumber dihadirkan untuk mendukung hipotesis. Pengujian hipotesis ini digunakan untuk menyebut struktur tematik dari berita.

Dalam menulis berita, seorang wartawan mempunyai tema tertentu atas suatu peristiwa. Ada beberapa elemen yang diamati dari perangkat tematik ini, yaitu koherensi, pertalian atau jalinan antar kata, proposi atau kalimat. Ada beberapa macam koherensi, yaitu: a) Koherensi sebab-akibat, b) Koherensi penjas, dan c) Koherensi pembeda. (Eriyanto, 2002:262-264).

Struktur retorik dari wacana berita menggambarkan pilihan gaya atau kata yang dipilih oleh wartawan untuk menekankan arti yang ingin ditonjolkan oleh wartawan. Wartawan menggunakan perangkat retorik untuk membuat citra, meningkatkan kemenonjolan pada sisi tertentu dan meningkatkan gambaran yang diinginkan dari suatu berita. Struktur retorik dari wacana berita menunjukkan kecenderungan bahwa apa yang disampaikan tersebut adalah suatu kebenaran.

Selain pesan, berita juga dapat dilakukan dengan menggunakan unsur grafis. Dalam wacana berita, grafis ini biasanya muncul lewat bagian tulisan yang dibuat lain dibandingkan dengan tulisan lain. Elemen grafis juga muncul dalam bentuk foto, gambar dan tabel untuk mendukung gagasan atau bagian lain yang tidak ingin ditonjolkan (Eriyanto, 2002:264-266). Tabel 1 menunjukkan elemen-elemen framing Pan dan Kosicki

Tabel 1: Skema Elemen-Elemen Framing Model Pan dan Kosicki

STRUKTUR	PERINGKAT FRAMING	UNIT YANG DIAMATI
<b>SINTAKSIS</b> Cara wartawan menyusun fakta	Skema berita	Headline, lead, latar informasi, kutipan sumber, pernyataan penutup
<b>SKRIP</b> Cara wartawan mengisahkan fakta	Kelengkapan berita	5W+1H
<b>TEMATIK</b> Cara wartawan menulis fakta	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Detail</li> <li>2. Koherensi</li> <li>3. Bentuk kalimat</li> <li>4. Kata ganti</li> </ol>	Paragraf, proposisi kalimat, hubungan antar kalimat
<b>RETORIS</b> Cara wartawan menekankan fakta	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Leksikon</li> <li>2. Grafis</li> <li>3. Metafora</li> </ol>	Kata, idiom, gambar/foto, grafik

Sumber: Eriyanto (2009:256)

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis framing. Pendekatan kualitatif dalam sebuah penelitian bertujuan untuk menggalang atau membangun suatu proposisi atau menjelaskan makna dibalik realita (Bungin, 2001:82). Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yang bertujuan membuat deskripsi secara sistematis, aktual, dan akurat tentang fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau obyek tertentu (Kriyantono, 2007:58). Dengan demikian penelitian ini tidak untuk menguji hipotesis, membuat prediksi, mempelajari implikasi tetapi hanya untuk mendapatkan gambaran.

Sasaran penelitian ini adalah dokumentasi berita-berita kasus Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah di Metrotvnews.com tanggal 16 – 23 Desember 2013. Judul-judul berita yang dijadikan obyek penelitian adalah: a) Penetapan Atut sebagai Tersangka Diharapkan Bongkar Segala Penyelewengan di Banten b) Mendagri Diimbau Ambil Langkah Strategis untuk Selamatkan Banten, c) Pemerintah Didesak Nonaktifkan Ratu Atut, d) Masyarakat Banten Dianggap Tak Bahagia Karena Dinasti Atut.

Unit analisis penelitian ini bersumber dari berita-berita kasus Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah di Metrotvnews.com dalam rentang 16 - 23 Desember 2013. Penulis hanya mengkhususkan pada jenis berita *straight news* yang merupakan salah satu tipe berita *hard news* (berita langsung) selain

*infotainment* dan *feature*. Kedua jenis berita yang terakhir tidak dimasukkan oleh penulis sebagai data yang akan dianalisis. Pengkhususan dilakukan agar penulis dapat lebih fokus dalam menganalisis pbingkaiian Metrotvnews.com terhadap teks berita tentang kasus Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah. Fokus analisa adalah teks yang terdapat pada berita. Agar dapat disajikan secara sistematis, peneliti mengarahkan metode Pan dan Kosicki dengan unit-unit analisis meliputi; 1) sintaksis, 2) skrip, 3) tematik, dan 4) retorik.

Untuk keperluan pengumpulan data, metode yang digunakan meliputi: 1) Dokumentasi berita-berita kasus Ratu Atut Choisyah yang dimuat di Metrotvnews.com selama bulan Desember 2013. Pemilihan waktunya didasarkan atas pertimbangan bahwa kasus Atut banyak menjadi perbincangan media (media online) dalam rentang tersebut, 2) Observasi, yaitu pengamatan terhadap berita kasus Ratu Atut Chosiyah di Metrotvnews.com periode 27 – 23 Desember 2013.

Sedangkan pemilihan sumber data, didasarkan pada sumber data primer dan data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, sedang sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2013:225). Data primer dalam penelitian ini bersumber dari dokumentasi berita-berita kasus Ratu Atut Chosiyah yang dimuat di Metrotvnews.com pada 17 - 23

Desember 2013. Sedangkan data sekunder diperoleh dengan studi literatur berupa pembacaan secara mendalam mengenai metode-metode penelitian, teori-teori sosial serta fenomena yang berkaitan dengan tema yang diteliti.

Menggunakan analisis framing Model Pan dan Kosicki, teknik analisis dilakukan dengan mencatat dan mengamati berita-berita Kasus Ratu Atut Chosiyah di Metronews.com selama bulan Desember 2013. Langkah ini dilakukan mengingat besarnya frekuensi pemberitaan kasus Ratu Atut di kedua media sehingga tidak memungkinkan semua berita dianalisis secara framing.

Asumsi framing Model Pan dan Kosicki adalah bahwa setiap berita memiliki frame yang merupakan representasi dari ideologi wartawan dan media. Pan dan Kosicki menyatakan bahwa terdapat dua konsepsi dari framing yang saling berkaitan (Eriyanto, 2002:252). Pertama, pada konsepsi psikologi yaitu bagaimana seseorang memproses informasi dalam dirinya serta bagaimana seseorang mengolah sejumlah informasi dan ditunjukkan dalam skema tertentu. Kedua, konsepsi sosiologis yaitu bagaimana individu menafsirkan suatu peristiwa melalui cara pandang tertentu. Bagaimana seseorang mengklasifikasikan, mengorganisasikan, dan menafsirkan pengalaman, untuk mengerti dirinya dan realitas di luar dirinya (Eriyanto, 2002:253).

Dalam pendekatan ini, perangkat framing dapat dibagi dalam struktur besar. Pertama, struktur sintaksis. Sintaksis berhubungan dengan bagaimana wartawan menyusun peristiwa dalam bentuk susunan umum berita. Dapat diamati dari bagan berita (*lead*, latar, *headline*, kutipan yang diambil dan sebagainya). Kedua struktur skrip, yaitu bagaimana wartawan mengisahkan atau menceritakan peristiwa ke dalam bentuk berita. Ketiga struktur tematik yang berhubungan dengan bagaimana wartawan mengungkapkan pandangan atas peristiwa ke dalam proposisi, kalimat atau hubungan antar kalimat yang membentuk teks secara keseluruhan. Keempat struktur retorik terkait bagaimana wartawan menekankan arti tertentu ke dalam berita. Struktur ini mencermati kegiatan wartawan memakai pilihan kata, idiom, grafik, dan gambar dipakai, bukan hanya mendukung tulisan melainkan juga

menekankan arti tertentu kepada pembaca (Eriyanto, 2002:255-256).

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### **Penetapan Atut sebagai Tersangka Diharapkan Bongkar Segala Penyelewengan di Banten**

Pasca penetapan Ratu Atut Chosiyah sebagai tersangka oleh KPK, Metrotvnews.com menurunkan berita yang menyoroti respon publik atas status Atut tersebut. Besar harapan publik, dengan status barunya itu beragam dugaan penyimpangan yang dilakukan Atut selama memimpin Banten bisa terkuak.

Dari analisis sintaksis, pandangan Metronews.com tersebut diwujudkan dalam skema atau bagan dalam berita. *Headline* atau judul yang ditampilkan media ini seolah menggiring pembaca bahwa selama Ratu Atut menjadi Gubernur Banten, aroma penyelewengan tercium sangat kuat. Hal ini juga tampak pada *lead* yang diturunkan:

*“Gebrakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten diharapkan mampu membuka semua penyelewengan yang terjadi di Banten.”*  
(metrotvnews.com 18 Desember 2013)

Melalui *lead* ini, pihak redaksi hendak mengatakan bahwa penetapan Gubernur perempuan pertama di Indonesia tersebut sebagai tersangka, setidaknya merupakan pintu masuk untuk membongkar dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten yang selama ini menjadi perbincangan publik. Terlihat bagaimana *lead* didesain dengan penonjolan, seolah-olah pihak redaksi ingin secepatnya pembaca mengetahui apa sebenarnya yang terjadi pada Atut dan bagaimana respon publik-yang ternyata begitu merindukan segera terbukanya dugaan penyimpangan itu. Dengan membaca *lead* sebuah berita, seseorang memang dimungkinkan mendapatkan pemahaman lebih cepat terhadap sebuah informasi. Hal ini dibenarkan Sobur (2002:77) yang menyatakan bahwa suatu peristiwa dapat dipahami lebih

awal melalui *lead* yang ditampilkan. Kesan masyarakat Banten begitu merindukan segera terbukanya dugaan penyipangan itu diperkuat oleh latar yang di pilih redaksi media.

Dengan mengutip pernyataan Hermawi F. Taslim sebagai latar berita, bahwa dalam beberapa tahun terakhir ini kelompok-kelompok kritis seperti mahasiswa, lembaga swadaya masyarakat, dan aktivis di Banten menengarai terjadinya penyimpangan dalam pemerintahan Atut, namun tidak berhasil membukannya. Khalayak sepertinya sedang diarahkan redaksi untuk melakukan membenaran terhadap dugaan penyimpangan tersebut. Secara implisit pula, latar berita *inheren* dengan maksud yang hendak dituju teks berita. Sebagaimana pemahaman Eriyanto (2009:236) bahwa latar peristiwa merupakan dasar hendak kemana makna teks dibawa.

Dalam teks berita, pengambilan Hermawi F. Taslim sebagai sumber kutipan berita menarik untuk dicermati. Bukan sebuah kebetulan jika *Metrotvnews.com* menjadikan Wakil Ketua Badan Advokasi Hukum (Bahu) DPP Partai Nasional Demokrat (Nasdem) tersebut sebagai nara sumber utama. Pemilihan nara sumber sebagaimana diyakini Hamad (2004:16) pastinya didasarkan atas pertimbangan tertentu. Apapun pertimbangan yang dipilih oleh pekerja media dalam mengkonstruksi realitas akan mempengaruhi makna yang muncul (Zhoest, 1993:1).

Sebagaimana diketahui bahwa Surya Paloh adalah deklarator sekaligus Ketua Dewan Pembina partai Nasdem yang juga pemimpin kelompok Media Group tempat *Metrotvnews.com* bernaung. Dengan kapasitasnya itu, tidak menutup kemungkinan sosok Surya Paloh memasukkan kepentingan politik terhadap media yang di milikinya. Padahal, Sudibyo (2001:55) dalam keyakinannya dengan tegas menyebutkan betapa kepentingan dan kekuasaan yang melingkupi media menyebabkan media bersangkutan menjadi tidak netral lagi.

Tinjauan komunikasi politik bahkan menyebut media massa (termasuk media online) dengan kekuatan yang dimilikinya seringkali dimanfaatkan oleh lembaga-lembaga politik seperti partai politik untuk mencapai tujuan-tujuan politik (Schramm, 1975:468-486). Dalam konteks ini, dinamika sistem politik suatu negara akan selalu meniscayakan persaingan antar partai politik yang ujung-ujungnya mengerucut pada politik

pencitraan dari partai bersangkutan (Fagen dalam Hamad, 2004:30) atau melakukan hal-hal yang menguntungkan partainya (tidak jarang mendeskreditkan).

Disamping mengutip Hermawi F. Taslim, teks berita juga menyertakan pernyataan Abraham Samad sebagai sumber kutipan. Namun, pemuatan ungkapan Ketua KPK tersebut tidak lebih sebagai pelengkap saja. Dalam teks, seluruh komentar Hermawi ditempatkan penulis dalam 5 paragraf secara berurutan mendominasi teks berita dari total 7 paragraf. Dengan cara ini, publik sedang diarahkan perhatiannya kepada pandangan Hermawi dan mengecilkan pernyataan Ketua KPK Abraham Samad yang ditempatkan pada paragraf akhir berita.

Cara wartawan menyusun peristiwa berdasarkan struktur skrip terbilang belum memenuhi kelengkapan unsur 5W+1H. Temuan ini didukung dengan tidak dijumpainya unsur H (*how*) pada teks berita. Kecuali unsur *how*, semua unsur 5W yang mencakup apa pendapatnya (*what*), siapa yang berpendapat mengenai hal itu (*who*), mengapa merek seperti itu (*why*), kapan dan dimana peristiwa tersebut berlangsung (*when*)-(*where*), telah terwakili dalam teks

Pada struktur tematik, terdapat dua tema besar yang ingin ditampilkan kepada khalayak. Pertama, penetapan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah sebagai tersangka diharapkan mampu membuka semua penyelewengan yang terjadi di Banten. Untuk memperkuat tema ini, redaksi mengutip pendapat Hermawi F. Taslim seperti tertuang dalam paragraf ke-2:

*“Mudah-mudahan penetapan Ratu Atut sebagai tersangka akan membongkar lebih banyak lagi kasus yang selama ini tertutup dan menyeret lebih banyak pelaku ke meja hijau. Karena, ada lebih banyak aktor yang terlibat dalam penyelewengan dan penggelapan di Banten,” kata Wakil Badan Advokasi Hukum (Bahu) DPP Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Hermawi F. Taslim di Jakarta” (metrotvnews.com 18 Desember 2013).*

Sedangkan tema kedua, masih menurut Hermawi F. Taslim yang dikutip pendapatnya mengatakan bahwa masyarakat Banten membutuhkan perubahan dan ingin keluar dari cengkaman Dinasti Ratu Atut.

Tema ini, digambarkan redaksi melalui paragraf ke-3. Tematik dalam teks dibuat selain dengan kutipan sumber berita juga dengan cara penulisan fakta yang mendukung gagasan.

Elemen wacana yang dipakai diantaranya adalah detail dan kata ganti. Pendapat Hermawi F. Taslim diuraikan dalam detail sebanyak 4 paragraf. Diawali akan hasrat masyarakat yang menginginkan perubahan, pihak redaksi kemudian menyajikan fakta-fakta betapa masyarakat Banten merasa termarginisasi dan jauh dari manfaat pembangunan. Fakta-fakta tersebut bahkan diperkuat dengan bermunculannya kelompok kritis yang mengendus beragam dugaan penyimpangan kepemimpinan Ratu Atut yang kesemuanya hanya berakhir sebatas diskusi.

Sebagai elemen detail terakhir, diungkapkan bagaimana peran Tubagus dalam melapangkan jalan bagi upaya pembongkaran kejahatan jaringan keluarga Atut. Sedangkan elemen kata ganti disajikan melalui pemakaian kata “mereka” untuk menggantikan istilah masyarakat Banten.

Pada aspek retorik, penonjolan dapat dilihat dari diambilnya kutipan Hermawi F. Taslim berupa kata “menyeret dan cengkraman.” Istilah “menyeret” sebagaimana dijumpai pada paragraf ke-2 yaitu: “...“Mudah-mudahan penetapan Ratu Atut sebagai tersangka akan membongkar lebih banyak lagi kasus yang selama ini tertutup dan menyeret lebih banyak pelaku ke meja hijau...,” menurut Kamus Bahasa Indonesia mengandung arti “membawa orang dengan paksa.” Sedangkan kata “cengkraman” bermakna berada dalam “genggaman” (<http://kbbi.web.id/mitra>) yang dalam teks ditujukan untuk menggambarkan kondisi masyarakat Banten selama kepemimpinan Ratu Atut yang jauh dari kata bahagia.

Telaah lebih mendalam menyebutkan bahwa bukanlah sebuah kebetulan apabila redaksi metrotvnews.com mengikutsertakan dua istilah tersebut (kata menyeret dan cengkraman) dalam struktur beritanya. Pertama, dalam hal proses produksi berita (Fishman dalam Aurora, 2006:49), pengutipan kedua kata tersebut pastinya telah mengikuti proses seleksi dan penyuntingan oleh pihak redaktur media bersangkutan. Bahkan pada tahap pembentukan berita (*creation of news*) kedua kata itu telah menyisihkan beberapa

pilihan kata lainnya, tentu saja menyesuaikan pesan yang ingin disampaikan kepada khalayak oleh wartawan. Dalam perspektif ini, pola kerja wartawan metrotvnews.com dari sudut pandang konstruksionis bisa dikategorikan sebagai agen/aktor konstruksi yang tidak hanya melaporkan fakta, memberitakan atau menstansi apa yang dilihatnya dilapangan, melainkan juga mendefinisikan peristiwa dan secara aktif membentuknya. Lebih jauh Eriyanto (2009:29) bahkan melihat wartawan dalam melakukan tugasnya tidak hanya mengambil realitas yang sebenarnya, tapi juga membentuk berita: ia menguraikan, mengurutkan, mengonstruksi peristiwa demi peristiwa, sumber demi sumber serta membentuk citra.

Kedua, pilihan pengutipan kata “menyeret dan cengkraman” yang dilontarkan Hermawi tidak lepas dari upaya metrotvnews.com untuk memperkuat citra negatif Ratu Atut yang muncul pasca penetapan Gubernur Banten tersebut sebagai tersangka oleh KPK. Langkah ini dapat dipahami dalam kerangka menggiring opini publik bahwa Atut dengan dinastinya sebagai pihak yang memang seolah-olah bersalah, sehingga perlu dilakukan pemaksaan untuk proses pengadilannya. Mengapa demikian? Karena selama ini Atut sulit tersentuh hukum.

Dari kedua hal di atas pertanyaan yang patut dikemukakan, apa kepentingan metrotvnews.com dengan citra negatif seorang Ratu Atut. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, temuan Hamad (2004:5) dalam bukunya yang berjudul “Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa” patut dijadikan rujukan. Hamad menilai bahwa muara dalam setiap liputan politik (termasuk kasus Ratu Atut) adalah pembentukan citra aktor/partai politik. Melalui opini publik yang dibangunnya, media mengonstruksi realitas salah satunya melalui bahasa/symbol-simbol politik (*language of politic*). Selain faktor eksternal, faktor internal yang turut berpengaruh dalam tindakan ini disamping kebijakan redaksional adalah kepentingan politik para pengelola media serta relasi media dengan sebuah kekuatan politik tertentu (Hamad, 2004:2-3).

Sudah bukan menjadi rahasia, jika publik mengenal Surya Paloh adalah Ketua Dewan Pembina Partai Nasdem sekaligus pemilik Media Group tempat metrotvnews.com bernaung. Dengan

demikian, meskipun metrotvnews.com berusaha untuk independen namun tetap saja akan sulit untuk lepas dari kepentingan politik Surya Paloh sebagai seorang politisi Partai Nasdem. Lazimnya partai politik yang sedang berkompetisi, rivalitas partai-partai yang akan bertarung dalam pemilu legislatif 2014 meniscayakan kebijakan-kebijakan strategis untuk memperebutkan pemilih. Masing-masing partai akan berupaya mengoptimalkan potensi yang dimiliki guna mendulang dukungan publik.

### **Mendagri Diimbau Ambil Langkah Strategis untuk Selamatkan Banten.**

Pada 19 Desember 2013 Metrotvnews.com menurunkan berita dengan judul “Mendagri Diimbau Ambil Langkah Strategis untuk Selamatkan Banten.” Berita tersebut merupakan tanggapan atas mangkirnya Atut dari tugas-tugas sebagai seorang kepala daerah yang memimpin Provinsi Banten.

Dalam perspektif sintaksis, judul yang digunakan Metrotvnews.com dapat dikategorikan cenderung instruktif. Dengan *headline* semacam ini, tergambar jelas keinginan redaksi untuk mensugestikan kepada khalayak bahwa kondisi pemerintahan Banten saat itu seolah-olah berada dalam posisi kritis yang harus segera diselamatkan. Untuk meneguhkan asumsi ini, *lead* pun dibangun dalam skema kalimat yang hampir sama dengan judul, yaitu: “Ketua Komisi I DPRD Banten Agus R. Wisas meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi segera mengambil langkah-langkah strategis untuk menyelamatkan roda pemerintahan Banten.”

Pemilihan Agus R. Wisas sebagai sumber rujukan berita, sekilas mencerminkan keinginan Metrotvnews.com untuk memotret peristiwa dengan lebih netral. Label otoritas kekuasaan yang melekat pada diri Agus R. Wisas selaku Ketua Komisi I DPRD memperkuat asumsi tersebut. Akan tetapi, pelibatan hanya satu sumber berita sedikit banyak melemahkan sisi netralitas yang hendak dikonstruksikan. Terlebih, jika diamati dari komentar-komentar Agus R. Wisas yang dihinggapi prasangka negatif atas sosok Atut. Ketidakberimbangan informasi, sesungguhnya dapat dihindari kalau saja pihak redaksi menghadirkan sumber berita lain sebagai

penyeimbang. Wawancara dengan pihak Atut menjadi penting artinya, terutama untuk melakukan konfirmasi atas kecurigaan Agus R. terkait penyebab ketidakhadiran sang gubernur pada beberapa agenda yang sempat diragukan kebenarannya oleh Agus.

Penelusuran lebih mendalam terhadap perilaku Metrotvnews.com tersebut memang tidak sepenuhnya bisa disalahkan. Mengingat dalam setiap penyajian berita politik, peran media sudah menjadi pihak yang menentukan format pesan politik, untuk selanjutnya menentukan citra para aktor atau isu-isu politik dan berpotensi mempengaruhi perilaku politik para elit politik khususnya dan massa umumnya ((Nimmo dalam Hamad, 2004:28). Prasangka negatif Metrotvnews.com di atas tertuang pada kutipan:

*“Dijelaskan Agus, kehadiran Atut dalam rapat paripurna kemarin diperlukan untuk menandatangani dokumen R-APBD Banten tahun 2014. Dokumen tersebut harus sudah ditandatangani oleh Atut sebelum 31 Desember 2013. “Nanti bagaimana kalau Atut sampai akhir Desember tidak juga muncul. Kita kan tidak tahu Atut apakah benar sakit, lalu sakitnya di mana. Ini kan ketidakpastian. Nggak mungkin pemerintah bisa jalan kalau seperti ini.”*  
*Selain soal R-APBD. Agus mengungkapkan kehadiran Atut juga diperlukan dalam pelantikan Bupati Lebak beberapa waktu ke depan. “Seharusnya dalam waktu dekat ini (pelantikannya). Tapi kan, tidak tidak bisa ditentukan juga kapan kepastian dari gubernur. Makanya keberadaan Atut dalam pemerintahan itu penting.”*  
*(metrotvnews.com 19 Desember 2013)*

Dengan skema berita semacam ini, dapat ditangkap kesan bahwa redaksi mencoba menggugah kesadaran khalayak tentang kondisi pemerintahan Banten yang penuh ketidakpastian dan harus segera diselamatkan dari perilaku tidak bertanggung jawab Ratu Atut sebagai sosok gubernur yang memang layak diganti agar roda pemerintahan bisa optimal.

Tinjauan struktur skrip memberikan gambaran akan penyebab (*why*) dari diusulkannya pengambilan langkah strategis untuk menyelamatkan Banten (*what*) kepada Kemendagri seperti di sampaikan Ketua

Komisi I DPRD I Banten (*who*) adalah karena Atut telah beberapa kali mangkir dari tanggung jawabnya sebagai Gubernur. Akan tetapi bagaimana bagaimana (*how*) permintaan tersebut disampaikan ternyata tidak ditemukan dalam teks.

Struktur tematik, digambarkan Metrotvnews.com dalam dua tema. Pertama, tentang pernyataan Ketua Komisi I DPRD Banten Agus R. Wisas yang meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi segera mengambil langkah-langkah strategis untuk menyelamatkan roda pemerintahan Banten. Pernyataan Agus R. Wasis dipertegas dengan secara detail mengilustrasikan penyebab munculnya ungkapan tersebut serta dampak yang ditimbulkannya. Betapa kelangsungan pemerintahan Provinsi Banten akan tersendat, jika Ratu Atut terkendala kehadirannya pada peristiwa-peristiwa yang menuntut keberadaan dia disana.

*“Nanti bagaimana kalau Atut sampai akhir Desember tidak juga muncul. Kita kan tidak tahu Atut apakah benar sakit, lalu sakitnya di mana. Ini kan ketidakpastian. Nggak mungkin pemerintah bisa jalan kalau seperti ini” ujarnya. (metrotvnews.com 19 Desember 2013)*

Tema kedua, bersumber pada saran Agus R. Wisas agar Atut mendelegasikan kewenangannya kepada Wakil Gubernur Rano Karno, seperti pada saat Pelantikan Bupati Lebak. Ungkapan ini pada prinsipnya dilontarkan untuk mendukung tema pertama terkait solusi terbaik dalam menyiasati ketiadaan Atut. Pada akhir paragraf tampak kalimat yang bersifat instruktif kepada Atut untuk mengirim surat kepada Wabup dan Mendagri yang isinya pendelegasian kewenangan dia sebagai Gubernur.

Struktur retorik dalam berita dapat ditelusuri dari penggunaan label “Ketua Komisi I DPRD Banten” yang tujuannya tidak lain untuk membangun kesan netral dari sisi pemilihan sumber kutipan. Meskipun seperti telah diungkapkan sebelumnya, alasan netralitas tersebut terlemahkan karena terpenuhinya perimbangan sumber kutipan. Penonjolan aspek retorik juga tampak pada pemakaian istilah “menyelamatkan roda pemerintahan,” serta pemilihan foto yang ditempatkan sebagai latar berita.

## **Pemerintah Didesak Nonaktifkan Ratu Atut**

Metrotvnes.com pada 20 Desember 2013 tepatnya pukul 18.30 menurunkan berita berjudul “Pemerintah Didesak Nonaktifkan Ratu Atut” Sorotan media online ini merupakan respon atas penahanan Ratu Atut setelah menjalani pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dari analisis sintaksis, khalayak-melalui judul yang dihadirkan Metrotvnews.com tengah diajak untuk berani mengambil sikap terhadap Ratu Atut. Sudah saatnya kepemimpinan sang Ratu diakhiri. Pemakaian kata “didesak nonaktifkan” yang cenderung bermakna kasar dan memaksakan kehendak, mengindikasikan secara implisit apa sesungguhnya target dari diturunkannya berita tersebut.

Harus diakui, pemilihan label otoritas DPRD sebagai pihak yang mengagas penonaktifan Ratu Atut sebagaimana tersaji pada *lead* berita, adalah upaya Metrotvnews.com meneropong peristiwa dari sudut pandang yang lebih netral dan proporsional. DPRD sebagai representasi kepentingan masyarakat saja memiliki inisiatif untuk mendorong penonaktifan Ratu Atut. Maka, status yang disandang Atut, dari sisi kepatutan boleh dikatakan telah keluar dari etika dan moralitas sebagai seorang pejabat publik. Padahal sebagai pengembal amanah rakyat yang dipilih secara langsung, seorang pejabat publik adalah teladan bagi rakyatnya. Apalagi alasan munculnya desakan tersebut semata-mata untuk menjamin efektifitas pemerintahan Banten dalam melakukan pelayanan kepada publik, maka desakan itu normal adanya. Selengkapnya kutipan mengenai hal tersebut tersaji pada *lead* berita berikut:

*“DPRD Banten mendesak pemerintah segera menonaktifkan Ratu Atut Chosiyah, selepas Gubernur Banten itu menjadi tahanan KPK. Itu semata-mata untuk menjamin pemerintahan Banten tetap efektif dan bisa melaksanakan pelayanan publik.” (metrotvnews.com 20 Desember 2013)*

Namun, seperti pada beberapa berita Metrotvnews.com sebelumnya, pemakaian hanya satu nara sumber sebagai rujukan menyebabkan berita yang disuguhkan terkesan

tidak berimbang. Tidak adanya wawancara terhadap kelompok/pihak yang mendukung Ratu Atut terutama anggota DPRD Banten yang berasal dari Partai Golkar, setidaknya telah mengurangi sisi netralitas yang hendak ditampilkan ke hadapan publik. Komentar-komentar Abdul Malik Haramain yang disusun secara berurutan dan saling melengkapi seolah membenarkan usulan anggota Komisi II dari Fraksi PKB bahwa penonaktifan Ratu Atut adalah harga mati. Hal ini bisa jadi sangat kontradiktif, mengingat prosedur pemberhentian seorang Gubernur telah diatur secara jelas oleh undang-undang. Penyusunan berita dalam skema demikian mengindikasikan bagaimana media berangkutan sedang menempatkan opini bahwa Atut harus segera dinonaktifkan sebagai pilihan terbaik bagi rakyat Banten saat ini.

Secara skrip, cara redaksi Metrotvnews.com dalam mengisahkan peristiwa tentang desakan Atut agar dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Gubernur Banten, tidak menjelaskan di mana (*where*) desakan itu disampaikan. Selebihnya, semua unsur berita telah terpenuhi dalam teks.

Dari sudut pandang tema, berita didominasi desakan kepada pemerintah untuk segera menonaktifkan Ratu Atut. Faktor penyebabnya sebagaimana dinyatakan Anggota Komisi II dari fraksi PKB Abdul Malik Haramain adalah agar pemerintahan Banten dapat berjalan efektif sehingga pelayanan publik bisa dimaksimalkan. Elemen detail diungkapkan untuk memperjelas tema utama antara lain tentang langkah-langkah yang segera diambil DPRD Banten terkait penahanan Atut dan faktor penyebabnya. Termasuk dalam elemen ini adalah pernyataan Haramain bahwa tidak ada alasan lagi untuk tidak memarkir Atut dari jabatannya yang oleh redaksi diperkuat lagi dengan menukil pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-undang no. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat 1 KUHP Pidana sebagai pasal yang menjerat atut. Penulisan fakta juga dilakukan dengan menggunakan koherensi penjelas ditandai dengan kata penghubung “dan” seperti pada paragraf 1.

Berdasarkan struktur retorik, Metronews.com sengaja menggunakan tanda petik (“) pada kutipan kata “**memarkir**” untuk memberikan penekanan bahwa tidak alasan buat pemerintah untuk tidak segera menonaktifkan Atut. Kata “memarkir”

sebagaimana disampaikan Abdul Malik Haramain pada paragraf ke-3 adalah metafora yang dalam makna denotatif (arti sesungguhnya) berarti menghentikan atau menaruh (kendaraan bermotor) untuk beberapa saat di tempat yg sudah disediakan (Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam ([www://kbbi.web.id/parkir](http://www://kbbi.web.id/parkir))). Kata “memarkir” sebenarnya bisa saja diganti dengan memberhentikan atau menonaktifkan. Pihak redaksi sepertinya sengaja ingin menyamakan Atut dengan kendaraan. Padahal diantara keduanya jelas jauh berbeda karena kendaraan tidak mempunyai pikiran apalagi etika dan moralitas.

### **Masyarakat Banten Dianggap Tak Bahagia karena Dinasti Atut**

Berita Metrotvnews.com tanggal 21 Desember 2013 pukul 13:29 WIB mengulas bagaimana publik mempersepsikan secara negatif Ratu Atut selama memimpin Provinsi Banten.

Dari sudut pandang sintaksis, deskripsi peristiwa dilakukan Metrotvnews.com dalam sebuah judul berita: “Masyarakat Banten Dianggap tak Bahagia karena Dinasti Atut.” Melalui judul ini Metrotvnews.com berusaha mengupas sisi lain seorang Ratu Atut dalam kapasitasnya sebagai pemimpin Banten selama 2 periode jabatan. Bahwa selama masa kepemimpinannya (Ratu Atut), masih terdapat kelompok-kelompok masyarakat Banten yang ternyata merasa tidak bahagia.

Asumsi tersebut semakin transparan, jika dirunut dari *lead* yang secara tegas menyatakan hal itu. Salah satunya seperti disuarakan Aktivis Jaringan Warga untuk Reformasi (Jawara) Banten Dahnil Anzar dalam sebuah diskusi di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat. Dengan bahasa yang lugas dan cenderung kasar ia mengatakan bahwa Dinasti Ratu Atut telah membungkam kebahagiaan sebagian besar masyarakat Banten.

Dari 5 paragraf dalam teks, kecuali elemen *lead* yang terdapat pada paragraf awal, seluruh teks berisi kutipan dari

Dahnil Anzar seorang. Dominasi kutipan dalam skema penyusunan fakta semacam ini mengisyaratkan maksud pihak redaksi yang ingin menonjolkan sisi kebenaran dari informasi yang disampaikan sumber berita. Dengan kata lain, media berusaha menggambarkan *stereotip* seorang Atut secara negatif melalui kutipan-kutipan sumber yang ditampilkan.

Kelengkapan struktur skrip pada berita yang diunggah tanggal 21 Desember 2013 telah terpenuhi-dengan dijumpainya semua unsur 5W+1H pada teks berita.

Unsur tematik, disajikan dalam satu tema besar tentang kepemimpinan Gubernur Banten Ratu Atut yang dipersepsikan tidak memberi kebahagiaan dan tidak memihak kepada masyarakat Banten. Tema tersebut diuraikan secara detail dengan menyebut beberapa sisi buruk kepemimpinan Ratu Atut. Meskipun detail yang disajikan cenderung singkat, akan tetapi informasi itu sangat berharga bagi penggambaran sosok Atut secara negatif di mata publik khususnya masyarakat Banten, seperti tertera dalam kutipan berikut:

*“Ungkapan kebahagiaan ditampilkan publik ketika Atut ditahan. Selama ini mereka tidak dapat mengungkapkan kegirangannya terhadap praktek rente. Menurutnya, masyarakat menilai Atut tak memihak mereka. Pemerintah Banten mengklaim madiri secara fiskal. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. “Tidak berpihak kepada rakyat” Adanya kesenjangan di Provinsi Banten. “Banten Selatan itu tertinggal. Sebagian besar jalannya saja rusak” (metrotvnews.com 21 Desember 2013)*

Dari segi struktur retorik, penekanan tampak pada pengutipan kata “praktek rente” dari pernyataan Dahnil Anzhar yaitu: .....mereka tidak dapat mengungkapkan kegirangannya terhadap praktek rente”. Istilah praktek rente (riba) dalam kontek ini ditujukan pada dinasti rente keluarga Atut, dengan demokrasi

sebagai lahan rentenya. Istilah rente dalam konteks ini dapat dimaknai sebagai suatu kondisi dengan pasar politik berbentuk oligopoli, di mana rekam jejak, integritas, dan kompetensi diabaikan. Kekuatan material dan hubungan darah diprioritaskan. Ketika perilaku *rent-seeking* di pasar politik terjadi dengan masif, lahirlah dinasti rente yang membajak semua anggaran publik di bawah kuasa mereka. (<http://koran.tempo.co/konten/> diakses tanggal 1 Maret 2014)

Di Banten, praktek dinasti rente yang secara operasional dikendalikan oleh satu orang inilah yang menyebabkan buruknya fakta sosial-ekonomi. Perilaku rente dengan membajak APBD Provinsi Banten menyebabkan hak-hak publik dikorbankan. Kekuatan legislatif, yang seharusnya menjadi pengawas, justru menjadi bagian besar dari dinasti rente ini. Hampir semua kekuatan partai politik di Banten, baik yang berada di DPRD maupun yang di luar, dikuasai oleh dinasti rente ini. Dinasti ini tak hanya menguasai Partai Golkar Banten. Sejatinya, mereka juga menguasai partai-partai politik lainnya di Banten, terutama politikus yang berada di DPRD, sehingga *checks and balances* secara formal tidak hadir (<http://koran.tempo.co/konten/>, diakses tanggal 1 Maret 2014)

### **Meneropong Kepentingan Politik Media Dibalik Kasus Ratu Atut Chosyiah**

Analisis konstruksi kasus Ratu Atut Chosyiah oleh Metrotvnews.com membuktikan bahwa dibalik realitas yang teramati (*virtual reality*) benar-benar tersimpan maksud tertentu (realitas tersembunyi/*hidden reality*) dari berita politik yang dibuat media bersangkutan. Dalam konteks ini, paradigma konstruksionis yang dianut media meniscayakan berita sebagai hasil konstruksi sosial yang selalu melibatkan pandangan, ideologi dan nilai-nilai wartawan atau media menjadi benar adanya. Artinya, kalau kemudian Metrotvnews.com mengkonstruksi kasus Ratu Atut menurut “pandangan” mereka

sendiri, bukan berarti langkah tersebut telah melanggar etika jurnalistik yang telah ditetapkan. Penyebabnya, karena paradigma konstruksionis melihat perbedaan antara realitas yang sesungguhnya dengan berita dipahami bukan sebagai sebuah kesalahan, tetapi sebagai suatu kewajaran karena berita adalah produk jurnalistik bukan representasi dari realitas (Eriyanto, 2009:26-27).

Demikian pula dengan posisi wartawan, paradigma konstruksionis bahkan memandang wartawan sebagai agen/aktor konstruksi. Wartawan bukan hanya melaporkan fakta, memberitakan atau mentransfer apa yang dilihatnya dilapangan, melainkan wartawan juga mendefinisikan peristiwa dan secara aktif membentuknya. Menurut Eriyanto, dalam melakukan tugasnya, wartawan sebetulnya bukan hanya mengambil realitas yang sebenarnya, tapi juga membentuk berita: ia menguraikan, mengurutkan, mengonstruksi peristiwa demi peristiwa, sumber demi sumber, serta membentuk citra dan berita tertentu. Apa yang kemudian tersaji dan muncul sebagai berita, pada dasarnya adalah hasil olahan dan konstruksi wartawan. Sebagai konsekuensinya, realitas yang dihasilkan bersifat subjektif (Eriyanto, 2009:29).

Maka, tidak mengherankan apabila nilai-nilai subyektifitas itupun juga menyelimuti *Metrotvnews.com* dalam mengkonstruksikan berita tentang kasus gubernur perempuan pertama di Indonesia tersebut. Secara umum, ada 2 pola kecenderungan dari masing-masing media dalam mengakomodasi unsur-unsur subyektifitas dalam format pemberitaan mereka dimana kepentingan media adalah fondasi utamanya. Pertama, mediaini terkesan membungkus tujuan *latent*-nya dengan cenderung mengedepankan sisi netralitas/obyektifitas dari berita yang turunkan. Yang kedua, ada kecenderungan tujuan politik mereka (kedua media) disampaikan secara lebih terbuka namun tidak *vulgar* menyesuaikan etika jurnalistik yang berlaku.

Untuk pola yang pertama misalnya, dapat dilihat pada berita *Metrotvnews.com* tanggal 20 Desember 2013 dengan judul "Pemerintah Didesak Nonaktifkan Ratu Atut." Dengan *lead* yang turut mengokohkan judul berita, harus diakui ada upaya secara implisit untuk mempengaruhi publik melakukan

pembenaran atas kelayakan penonaktifan Atut. Keberadaan label otoritas "DPRD" yang tersaji dalam *lead* sesungguhnya dapat dianggap sebagai langkah menyusun fakta agar terlihat netral dan proporsional. Akan tetapi jika ditelusuri lebih jauh, dibalik pemakaian label otoritas "DPRD" tersebut secara implisit dapat dimaknai sebagai strategi redaksi agar publik membenarkan gagasan penonaktifan Sang Ratu. Padahal "pembenaran" itu semestinya baru bisa terjadi jika status Atut sudah berkekuatan hukum. Dalam artian, Atut akan berhenti dari jabatannya sebagai Gubernur Banten bila secara yuridis dia telah ditetapkan bersalah. Ke-subyektif-an berita semakin terlihat jelas dari sumber kutipan yang hanya melibatkan 1 sumber kutipan. Itupun hanya berasal dari pihak yang sejalan dengan gagasan teks (walaupun kutipan berasal dari pejabat formal) tanpa pernah menyertakan kelompok yang berbeda pandangan, sehingga berita menjadi tidak berimbang. Asumsi ini semakin kuat apabila dikaitkan dengan pilihan tema serta penonjolan retorik yang disajikan.

Untuk format yang kedua, meskipun masih dalam bingkai kaedah-kaedah jurnalistik dalam pemberitaan suatu peristiwa, tidak bisa dipungkiri *Metrotvnews.com* terkesan sedikit mengabaikan sisi netralitas dalam menyampaikan tujuan politiknya. Hal ini tampak dari pengamatan terhadap struktur sintaksis, tematik maupun retorik tau foto yang ditonjolkan untuk mendukung berita. Dari 6 judul berita yang dipilih, pola pemberitaan model inilah yang justru lebih mendominasi.

Satu catatan penting, hal paling mencolok dari sikap subyektif (walaupun dalam pandangan paradigma konstruksionis dianggap sebagai sesuatu yang wajar) yang paling utama adalah pada masih dominannya pengambilan sumber kutipan dengan hanya melibatkan satu pihak. Meskipun menggunakan tokoh-tokoh formal atau kelompok intelektual yang berintegritas mumpuni, akan tetapi karena pilihan dan penonjolan itu menyesuaikan kepentingan redaksi media bersangkutan, maka dampak yang muncul adalah penampilan struktur berita pada bagain lain yang mau tidak mau harus mengikuti kepentingan tersebut. Tegasnya, pilihan-pilihan ini adalah keniscayaan dari proses konstruksi berita yang tidak memungkinkan sebuah media keluar dari kepentingan ideologi, idealis, maupun

ekonomi dan sistem politik media. Begitu juga dengan Metrotvnews.com

Seperti telah dikemukakan sebelumnya bahwa unsur subyektifitas akan selalu muncul dalam konstruksi berita terhadap suatu peristiwa oleh media. Dan melekat pada subyektifitas tersebut adalah kepentingan dari media bersangkutan. Pertanyaannya, apa kepentingan Metrotvnews.com terhadap kasus yang mendera Atut? Dalam kaitan ini, menarik untuk disimak pernyataan Gandy (dalam Hamad, 2004:21) bahwa konstruksi realitas politik sangat ditentukan oleh siapa yang memiliki kepentingan (menarik keuntungan atau pihak mana yang akan diuntungkan) dengan suatu berita, dimana kepentingan itu bisa dimiliki oleh media atau pihak yang memiliki relasi khusus dengan media tersebut. Secara sederhana, kepemilikan atas media akan mempengaruhi kepentingan mereka terhadap berita-berita yang akan diturunkan.

Bagi Metrotvnews.com posisi Surya Paloh sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Nasdem sekaligus pemimpin kelompok Media Group tempat Metrotvnews.com, ibarat 2 sisi mata uang yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Sehingga sulit bagi media ini untuk tidak mengakomodasi kepentingan-kepentingan politik Surya Paloh dalam setiap pemberitaannya. Terlebih menjelang perhelatan akbar dalam bentuk Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden di tahun politik 2014 ini. Dari sudut pandang tautan media massa dengan komunikasi politik, fenomena ini dianggap wajar mengingat sebagaimana diyakini Sudibyo (2001:55) betapa kepentingan dan kekuasaan yang melingkupi media menyebabkan media bersangkutan menjadi tidak netral lagi.

Layaknya sebuah partai politik, Partai Nasional Demokrat (Nasdem) bentukan Surya Paloh secara kodrati tentu saja akan berusaha mengoptimalkan potensi yang dimiliki untuk mencapai tujuan-tujuan politiknya. Termasuk dalam hal ini adalah bagaimana memanfaatkan peristiwa politik yang ada untuk membangun citra partai di mata publik. Bahwa kasus Atut adalah *moment* penting yang bisa memberi keuntungan Partai Nasdem adalah sebuah kemungkinan yang perlu di-ihtiyarkan. Mengapa demikian, karena Ratu Atut adalah kader sebuah partai dengan konstituen cukup besar, sehingga ketika kepercayaan publik mulai goyah kepada partai tempat Atut

bernaung, harapan agar mereka (konstituen) mengalihkan pilihannya kepada partai lain semakin terbuka. Sikap aktif melalui pembentukan opini di media diyakini memungkinkan merebut hati publik terhadap pilihan politik mereka. Format pemberitaan ber-label pengungkapan fakta-fakta politik dalam sudut pandang obyektif terhadap peristiwa dugaan penyuaipan yang selama ini dituduhkan kepada Ratu Atut adalah sebuah pilihan bagi pencapaian harapan tersebut. Kondisi inilah yang coba disikapi Surya Paloh melalui Partai Nasden dan Metrotvnews.com.

Dengan kata lain, walupun tidak mengidentifikasi dirinya sebagai media partisan, namun sebagai media yang berada dalam kendali kelompok bisnis pimpinan Surya Paloh yang *notabene* juga petinggi Partai Nasdem, mau tidak mau pemilik Metrotvnews.com berkepentingan mengambil keuntungan dari ruang yang ditinggal publik karena kecewa pada kepemimpinan Ratu Atut.

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Metrotvnews.com dalam mengkonstruksikan kasus Ratu Atut Chosiyah cenderung bersifat negatif. Kecenderungan ini bisa dilihat dari struktur sintaksis, skrip, tematik dan retorik yang disajikan. Diantaranya dari sisi pemilihan judul dan sumber kutipan. Dari 6 judul yang dipilih, sebagian besar merupakan judul yang cenderung melemahkan citra Atut. Selebihnya, walaupun tampak netral akan tetapi tetap tidak menguntungkan Atut. Demikian halnya dengan sumber-sumber yang dirujuk. Meskipun beberapa kutipan menggunakan tokoh-tokoh yang memiliki integritas keilmuan dan berasal dari institusi formal, namun sebagian besar kutipan yang dipilih adalah kutipan-kutipan yang sekali lagi melemahkan posisi Atut
2. Terkait pemilihan sumber kutipan yang dijadikan rujukan, media ini kebanyakan hanya menggunakan satu sumber rujukan, sehingga azas keberimbangan tidak terpenuhi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aurora, Raden Army. 2006. *Pemberitaan Masalah Sampah di Kota Bandung Dalam Harian Umum Pikiran Rakyat dan Harian Umum Kompas*. Bandung: Universitas Padjajaran
- Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Universitas Erlangga
- Eriyanto. 2002. *Analisis Framing: Konstruksi, Idiologi, dan Politik Media. Cet. I*. Yogyakarta: Penerbit LKiS
- Eriyanto, 2009. *Analisis Framing. Konstruksi, Idiologi dan Politik Media. Cet. IV*. Yogyakarta: LKiS Printing Cemerlang.
- DeFleur, Melvin and Sandra Ball-Rocheach, Sandra. 1989. *Theories of Mass Communication, (5 Edition)*. New York: Logman
- Hamad, Ibnu. 2004. *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa. Sebuah Studi Critical Discourse Analysis terhadap Berita-Berita Politik*. Jakarta: Ganit.
- Kriyantono, Rahmad. 2012. *Teknik Praktis. Riset Komunikasi Disertai Contoh Praktis Riset Media. Public Relations. Advertising. Komunikasi. Organisasi Komunikasi Pemasaran*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Santana K, Septiawan. 2005. *Jurnalisme Kontemporer*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Siregar, A. 1998. *Bagaimana meliput dan Menulis Berita untuk Media Massa*. Yogyakarta: Kanisius.
- Siebert, Fred S. et al. 1986. *Empat Teori Pers (terj. Putu Laxman Senjaya Pendit)*. Jakarta: PT Intermamasa
- Schramm, Wilbur. 1975. *Responsibility in Mass Communications*. New York: Harper's Row Publisher
- Sobur, Alex. 2002. *Analisa Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisa Wacana,*

*Analisa Semiotika dan Analisa Framing*. Bandung: Remaja Rodakarya.

Sudibyo, Agus. 2001. *Analisis Teks Media*. Bandung : Remaja Rosdakarya.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif dan R and D*. Bandung: CV Alfabeta.

Tuchman, Gaye. 1980. *A Study in the Construction of Reality*. NY: The Free Press.

Zoest, Aart Van. 1993. *Semiotika*. Jakarta: Yayasan Sumber Agung

### Internet

<http://www.metrotvnews.com> diakses 21 Pebruari 2014

[www:// kbbi.web.id/parkir](http://www.kbbi.web.id/parkir) diakses 1 Maret 2014

<http://www.tvonenews.tv> diakses tanggal 4 Januari 2014.

<http://koran.tempo.co/konten/> diakses 1 Maret 2014

<http://id.wikipedia.org/wiki/Kebodohan> diakses 1 Maret 2014

<http://kbbi.web.id/mitra> diakses 1 Maret 2014